

VISI

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit, maupun lingkungan serta perilaku yang tidak mendukung hidup sehat.

Seiring dengan gambaran ideal pembangunan kesehatan dimaksud dan dalam upaya mendukung Visi Bupati Simalungun yakni **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN KABUPATEN SIMALUNGUN YANG MANDIRI, TENTRAM DAN BERSERI (MANTAB)”**, maka Visi Dinas Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Simalungun adalah:

***"Peningkatan Kesehatan Masyarakat Yang
'MANTAB' Menuju Simalungun Sehat"***

MISI

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Simalungun. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Ada 4 (empat) misi yang diemban oleh seluruh jajaran kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu:

4.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kesehatan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (*preventif*), dan peningkatan kesehatan (*promotif*) bagi segenap masyarakat, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (*curatif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan antara pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta. Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan sosial telah berkembang, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga

4.1.2 Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dan Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan di Kabupaten Simalungun. Kesehatan juga adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya

pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

4.1.3 Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Upaya Pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan untuk mendorong penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi dan bermutu bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan, usia lanjut dan pelayanan rujukan. Upaya pelayanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memberdayakan Puskesmas dan jaringannya dalam pelayanan kesehatan luar gedung serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya

4.1.4 Penataan Manajemen dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan perlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Tenaga kesehatan yang bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan pemerintah harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil-guna serta berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, makanan dan minuman yang aman, bermutu serta dengan pengawasan yang baik.